

Peran Moderasi Kepemimpinan dalam Pengujian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (*The Moderating Role of Leadership in Testing Government Performance Accountability*)

Alfia Kamalia^{1*}, Amrie Firmansyah²

Universitas Trisakti Jakarta, Jakarta^{1*}, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jawa Barat²

alfia46kamalia@gmail.com^{1*}, amriefirmansyah@upnvj.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 7 Juli 2024

Revisi 1 pada 31 Juli 2024

Revisi 2 pada 5 Agustus 2024

Revisi 3 pada 8 Agustus 2024

Disetujui pada 9 Agustus 2024

Abstract

Purpose: This study examines the effects of the government's internal control system and the implementation of good public governance on government performance accountability. In addition, leadership style can affect the government's internal control system and implementation of good public governance.

Methodology: The testing method used in this study was a quantitative method. This study used a questionnaire to collect data. The questionnaire was distributed by random sampling through Google Forms media to all civil state apparatuses at the Ministry of Communication and Information. Fifty questionnaires were obtained for distribution was 50 respondents. Hypothesis testing was performed using a Structural Equation Model (SEM).

Results: The government's internal control system and implementation of good public governance positively affect government performance accountability. The leadership style weakens the government's internal control system on government performance accountability. Leadership style does not affect the application of good public governance to government performance accountability.

Limitations: The questionnaire items were compiled based on limited sources, causing some items to be declared invalid. The distribution of questionnaires via Google Forms was not believed to be valid for the answers given by respondents and could not be confirmed directly.

Contribution: This research is expected to improve the government's accountability for its performance and serve as a reference for further research.

Keywords: *internal control; governance; performance accountability; leadership*

How to Cite: Kamalia, A., Firmansyah, A. (2024). Peran Moderasi Kepemimpinan dalam Pengujian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(4), 311-325.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi isu sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Kementerian Keuangan (2023) keberhasilan kinerja pemerintah dilihat dari segi perencanaan, proses pelaksanaan, *output*, manfaat dan *outcome* yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi penentu keberhasilan suatu program pemerintah yang telah direncanakan untuk jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun (Haryanto, 2023). Hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mendapatkan perhatian utama dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja instansi atas kepercayaan yang diberikan oleh penyelenggara negara

(Makruf, 2024). Faktor yang mendasari adanya tuntutan masyarakat terkait akuntabilitas kinerja pemerintah, antara lain keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, adanya praktik manipulasi data atau informasi kinerja yang meragukan tingkat keabsahan atas akuntabilitas instansi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja, ketidakjelasan dalam penentuan indikator kinerja yang dapat mempersulit evaluasi kinerja secara obyektif, dan kurangnya mekanisme pengawasan atas penyalahgunaan wewenang serta ketidakpatuhan terhadap tata kelola yang baik (Febrianti & Indrawati Yuhertiana, 2021; J. J. Pitaloka & Handayani, 2020). Faktor-faktor tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kasus *fraud* yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terkait penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan anggaran negara pada instansinya. Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang memuat perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Menurut Marsus (2022), Evaluasi manajemen kinerja mencakup kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga saat evaluasi dilakukan. Dalam mendukung implementasi SAKIP, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah dokumen yang memuat uraian tentang kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN/APBD.

Penyusunan LAKIP memiliki berbagai permasalahan seperti kurangnya koordinasi antar unit kerja di suatu instansi pemerintahan dan pemahaman terkait mekanisme penyusunan LAKIP menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan kinerja (Sinulingga, 2022). Selain itu target kinerja yang tidak ditetapkan secara SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) membuat kinerja menjadi sulit dicapai dan diukur oleh organisasi (Badan Kepegawaian Negara, 2021). Pemahaman tentang konsep dan prinsip akuntabilitas kinerja di sektor publik belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak. Hal ini dapat terlihat dari penilaian atas LAKIP pada organisasi sektor publik yang berkualitas rendah.

Menurut Noormansyah dan Sirkomba (2022), indikator akuntabilitas kinerja dan keuangan yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan nilai akuntabilitas kinerja dari SAKIP. Untuk mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perlu didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP memiliki peran penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Menurut Rahmani (2023), kegagalan *good governance* dapat disebabkan oleh lemahnya SPI dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian akuntabilitas kinerja pemerintah belum banyak dilakukan terutama pada instansi pemerintah pusat. Pada penelitian sebelumnya hanya fokus menguji terkait kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja organisasi publik tingkat daerah. Beberapa penelitian sebelumnya mengulas sistem pengendalian internal yang berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada instansi level pemerintah daerah (Aziz dan Fitriaty, 2023; Anggriany dan Hasnawati, 2023; Rahmani, 2023; Ibrahim, 2023; Wahida dan Suryaningrum, 2023; Heluka et al., 2022; Mattoasi, Musue, dan Rauf, 2021). Beberapa diantaranya membahas penelitian pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada instansi level pemerintah daerah (Rakhma dan Sulistyowati, 2021; Manik, Nainggolan, dan Nainggolan, 2022; Tome et al., 2023; Doni et al., 2023; Haryanto dan Andayan, 2023; Sugiarto, 2024; Putra dan Fitri, 2024; Krisnanda dan Anwar, 2024; Putra, Rivandi, dan Zulvia, 2024; Jeaneta dan Handayani, 2024). Sementara itu, Azizah dan Hidayat (2023) menemukan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena adanya kelemahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Surabaya. Penelitian tersebut didukung oleh Mujannah et al., (2022) yang menyebutkan lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin.

Selain SPIP, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian terkait *good governance* pada sektor publik belum banyak dilakukan. Penelitian terdahulu, pengujian *good governance* memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah hanya dilakukan pada organisasi publik pemerintah daerah (Karlina, Lewaru, dan Kriswanti, 2023; Heluka et al., 2022; Israr dan Syofyan, 2022; Sutarsa, 2023; Wahyu, Putra, dan Giri, 2022). Namun penelitian lain tidak sejalan dan menghasilkan bahwa *good governance* tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah (Noormansyah dan Sirkomba, 2022; Rahmani, 2023). Pengaruh *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah akan dilakukan pengujian lebih lanjut pada instansi pemerintah pusat.

Penelitian atas pengaruh SPIP dan penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah banyak dilakukan pada pemerintah daerah. Hasil penelitian yang berbeda-beda atas kinerja atau akuntabilitas kinerja pemerintah menyebabkan penelitian ini perlu dilakukan ulang namun pengujian dilakukan pada pemerintah pusat. Perbedaan penelitian ini adalah dengan menambahkan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya menghasilkan adanya hubungan positif gaya kepemimpinan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah (Ibrahim 2023; Anggriany dan Hasnawati 2023; Wahyu, Putra, dan Giri 2022). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah guna menilai akuntabilitas kinerja pemerintah dalam melakukan implementasi perencanaan program anggaran pada sektor pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang akuntansi sektor publik.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori institusional adalah salah satu teori yang dipakai untuk mengerti tingkah laku individu dan organisasi (Dacin, Goodstein, dan Scott, 2002). Teori institusional diidentifikasi memiliki tiga sumber utama tekanan terhadap norma atau praktik yaitu fungsional, politik dan sosial. Tekanan pertama, fungsional muncul dari masalah yang dirasakan dalam tingkat kinerja atau manfaat terkait praktik kelembagaan. Kedua, tekanan politik diakibatkan oleh pergeseran kepentingan dan distribusi kekuasaan yang mendukung tatanan kelembagaan yang ada. Terakhir, tekanan sosial berkaitan dengan diferensiasi kelompok, adanya keyakinan dan praktik yang tidak sejalan, perubahan hukum atau harapan sosial yang dapat menghalangi suatu praktik. Teori institusional memiliki 2 pandangan yaitu *old-institutional theory* (OIT) dan *new institutional theory* (NIT). Menurut Kisworo dan Shauki (2019), OIT berpendapat bahwa institusi terjadi karena adanya nilai, norma dan perilaku yang bersifat bawaan. Sementara itu, NIT berpendapat bahwa institusi terjadi karena organisasi mempertimbangkan *classifications, routines, scripts, dan schema*.

Akuntabilitas merupakan jenis tata kelola yang menekankan tanggung jawab terhadap keputusan dan hasil kerja yang didapatkan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang yang dimiliki untuk mengelola organisasi (Zaviera et al., 2021). Menurut Hardana (2023), akuntabilitas merujuk pada proses memberikan informasi dan mengungkapkan hasil keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Akuntabilitas kinerja pemerintah dipengaruhi oleh perilaku individu suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan kinerja program dan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi yaitu memberi pelayanan publik. Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal, penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin baik SPIP maka akuntabilitas kinerja juga semakin baik. SPIP dapat membantu menjamin bahwa instansi pemerintah mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku. Menurut Padmadiani et al., (2023), pengawasan internal berdampak positif pada akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gorontalo.

SPIP terdiri dari beberapa elemen termasuk *control environment*, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern (PP No 60 Tahun 2008). Dengan melaksanakan SPIP sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan dengan mempertanggungjawabkan anggaran secara jelas, tepat dan jujur (Harjaningrum dan Ardini, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Ibrahim (2023), semakin baik

pengendalian internal maka semakin baik komitmen dan kinerja organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

H₁ : SPIP berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas kinerja yang baik dapat terwujud apabila organisasi memiliki tata kelola yang baik dan taat kepada peraturan yang berlaku. *Good public governance* merupakan konsep dasar pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dipertanggungjawabkan secara bersama. Pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip *good public governance* untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Namun dalam implikasinya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh aspek pemangku kepentingan yang melibatkan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Menurut hasil penelitian Israr dan Syofyan (2022), penerapan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Penelitian lain dari Sutarsa (2023) membuktikan bahwa *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI, 2022) menyatakan bahwa governansi sektor publik penting untuk meningkatkan keyakinan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan visi Indonesia merdeka.

H₂ : GPG berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Gaya kepemimpinan adalah aspek dari gaya perilaku seorang pemimpin yang fokus pada bagaimana proses kepemimpinan berinteraksi dalam memengaruhi aktivitas individu untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu (Erliyanti et al., 2022). Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memengaruhi tingkah laku dan mengelola staf agar bekerja sama dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan perusahaan atau kesuksesan bisnis. Ismail (2024) menyatakan bahwa pemimpin dalam sektor publik harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan akuntabilitas di antara stafnya melalui kepemimpinan yang tangguh dan tersedianya sumber daya yang mencukupi. Selain itu, penelitian dari Sidik & Safitri (2020) menyebutkan tujuan organisasi dapat mudah tercapai jika pemimpin organisasi dapat memberikan arahan kepada bawahannya dengan baik.

Gaya kepemimpinan pada sektor publik dipengaruhi oleh teori pemangku kepentingan (stakeholder). Teori stakeholder menurut Palupi et al., (2024) bahwa organisasi dapat bertahan apabila organisasi dapat menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingannya. Teori ini berkaitan dengan kewenangan pemangku kepentingan kepada perusahaan agar dapat memenuhi harapan termasuk menciptakan akuntabilitas dalam bentuk laporan keberlanjutan (Amalia, Kharisma, dan Firmansyah, 2024). Konteks dari teori pemangku kepentingan yakni organisasi memiliki tanggung jawab sosial dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak yang terkait, serta menjalankan bisnis dengan etika dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Julythiawati dan Ardiana, 2023).

SPIP dapat terlaksana dengan baik apabila pemimpin suatu organisasi dapat mempengaruhi individu untuk menjalankan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan dan pengendalian internal secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Steni dan Fitria, 2022). Menurut Anggriany dan Hasnawati (2023), kepemimpinan transformasional dan sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dan pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah.

H₃ : Gaya Kepemimpinan memperkuat hubungan positif antara SPIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Gaya kepemimpinan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi *good governance* (Erliyanti, Yuniani, dan Hamdani, 2022). Noormansyah dan Sirkomba (2022) menyatakan *good public governance* merupakan syarat utama pembangunan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mempengaruhi implementasi program-program pembangunan nasional. Penelitian Israr dan Syofyan (2022) menghasilkan bahwa *good public governance* memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas

kinerja pemerintah. Dengan adanya *good public governance* maka pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dilaksanakan secara bertanggungjawab dan akuntabel dalam Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

H₄ : Gaya Kepemimpinan memperkuat hubungan positif antara GPG terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner terstruktur sebagai sumber data primer yang dibagikan mulai dari tanggal 1 hingga 31 Maret 2024. Seluruh indikator item dinilai menggunakan skala likert enam poin, dari 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = agak setuju, 5 = setuju, dan 6 = sangat setuju. Indikator yang digunakan sebagai pertanyaan kuesioner mengacu pada PP No 60 Tahun 2008, PUGSPI 2022 dan referensi pertanyaan dari penelitian sebelumnya.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode nonprobability sampling dengan jenis sampel jenuh. Jumlah populasi dari pengujian ini sebanyak 50 responden menjadi sampel penelitian. Responden merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component-based structural equation modeling*. Alat bantu *software* aplikasi statistik yang digunakan adalah SmartPLS.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja pemerintah. Indikator yang digunakan dalam membangun kuesioner terkait akuntabilitas kinerja pemerintah mengikuti Agustin (2018). Adapun item-item indikator dalam kuesioner tersebut, antara lain:

- AKP1 Instansi Bapak/Ibu telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk setiap kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan
- AKP2 Pada instansi Bapak/Ibu memiliki prosedur tata kelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- AKP3 Pada instansi Bapak/Ibu menerapkan prosedur tata kelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- AKP4 Pelaksanaan kegiatan pada instansi Bapak/Ibu telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program
- AKP5 Kegiatan/program yang disusun oleh instansi Bapak/Ibu telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat
- AKP6 Instansi Bapak/Ibu memiliki keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan
- AKP7 Laporan kegiatan pada instansi Bapak/Ibu telah disusun berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku
- AKP8 Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada instansi Bapak/Ibu memperhatikan efektivitas dan efisiensi
- AKP9 Perjanggjawaban pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada instansi Bapak/Ibu telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan sah
- AKP10 Instansi Bapak/Ibu menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan

Variabel independen pada penelitian ini terdiri atas sistem pengendalian internal pemerintah dan *good public government*. PP No 60 Tahun 2008 menjadi dasar dalam penentuan indikator variabel sistem pengendalian internal pemerintah. Item-item pada kuesioner sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

- SPIP1 Instansi Bapak/Ibu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai
- SPIP2 Bapak/Ibu berkomitmen atas kompetensi yang dimiliki

- SPIP3 Pimpinan di instansi Bapak/Ibu mengambil keputusan sesuai dengan penilaian risiko organisasi
- SPIP4 Pimpinan di instansi Bapak/Ibu melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai kebutuhan secara berkala
- SPIP5 Pimpinan di instansi Bapak/Ibu memberikan wewenang dan tanggung jawab yang tepat kepada pegawai
- SPIP6 Instansi Bapak/Ibu menyusun dan menerapkan kebijakan tentang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- SPIP7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di instansi Bapak/Ibu menjalankan perannya sesuai kebijakan dan prosedur
- SPIP8 Bapak/Ibu menjalin hubungan kerja dengan baik antar pegawai dan instansi

Penilaian Risiko

- SPIP9 Instansi Bapak/Ibu melakukan identifikasi risiko atas program dalam mencapai tujuan organisasi
- SPIP10 Instansi Bapak/Ibu melakukan identifikasi risiko atas kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi
- SPIP11 Instansi Bapak/Ibu melakukan analisa terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan organisasi

Kegiatan Pengendalian

- SPIP12 Instansi Bapak/Ibu melakukan reuiu atas kinerja organisasi secara rutin
- SPIP13 Instansi Bapak/Ibu rutin melakukan pembinaan untuk para pegawai
- SPIP14 Instansi Bapak/Ibu selalu mengendalikan pengelolaan atas sistem informasi organisasi
- SPIP15 Adanya pencatatan dan cek fisik atas aset BMN di instansi Bapak/Ibu
- SPIP16 Instansi Bapak/Ibu menetapkan dan melakukan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi
- SPIP17 Adanya pemisahan fungsi dalam Instansi Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara jelas
- SPIP18 Pimpinan di instansi Bapak/Ibu memberikan kewenangan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- SPIP19 Instansi Bapak/Ibu melakukan pencatatan secara akurat dan tepat waktu atas setiap kegiatan yang dilakukan
- SPIP20 Adanya pembatasan akses sumber daya di instansi Bapak/Ibu bekerja
- SPIP21 Instansi Bapak/Ibu menyampaikan informasi terkait capaian kinerja organisasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
- SPIP22 Instansi Bapak/Ibu menyajikan informasi dan dokumentasi atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Informasi Dan Komunikasi

- SPIP23 Instansi Bapak/Ibu menyediakan informasi dengan dengan jelas dan tepat waktu
- SPIP24 Instansi Bapak/Ibu selalu mengembangkan dan memperbarui sistem informasi yang ada

Pemantauan Pengendalian

- SPIP25 Pimpinan di instansi Bapak/Ibu melakukan pemantauan atas penerapan sistem pengendalian internal
- SPIP26 Instansi Bapak/Ibu melakukan evaluasi dan menindaklanjuti setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat

Variabel independen lainnya yaitu *good public governance*. Item-item indikator pada kuesioner mengacu pada Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI, 2022) antara lain:

- GPG1 Bapak/Ibu memberikan contoh teladan dan menerapkan prinsip dalam berorganisasi untuk mencapai kinerja instansi.
- GPG2 Bapak/Ibu menjunjung etika dan kejujuran yang tinggi dalam bertindak untuk mencapai kinerja instansi.

- GPG3 Bapak/Ibu tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum di Indonesia dalam mencapai kinerja organisasi.
- GPG4 Bapak/Ibu menjunjung tinggi keterbukaan dalam pengungkapan informasi publik pada pengambilan keputusan untuk mencapai kinerja instansi.
- GPG5 Bapak/Ibu tidak dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil keputusan dalam mencapai kinerja instansi.
- GPG6 Bapak/Ibu memiliki rasa tanggung jawab atas tercapainya kinerja instansi.
- GPG7 Bapak/Ibu memegang teguh amanah yang diberikan untuk mencapai kinerja instansi.
- GPG8 Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- GPG9 Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam mencapai kinerja instansi dengan mengikuti pelatihan secara berkala.
- GPG10 Bapak/Ibu memiliki rasa peduli kepada tim kerja dan organisasi dalam bertindak untuk mencapai kinerja instansi.
- GPG11 Bapak/Ibu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan organisasi serta rela berkorban untuk mencapai kinerja instansi.
- GPG12 Bapak/Ibu bersikap adaptif atas perubahan yang ada pada instansi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.
- GPG13 Bapak/Ibu bersikap kolaboratif dalam bekerjasama dengan tim untuk mencapai kinerja instansi.

Sementara variabel moderasi penelitian ini adalah gaya kepemimpinan. Indikator atas variabel gaya kepemimpinan mengikuti Sari dan Putra (2019). Item-item kuesioner diantaranya:

- GK1 Pimpinan instansi saya mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
- GK2 Pimpinan instansi saya memberikan motivasi untuk mencapai kinerja organisasi.
- GK3 Pimpinan instansi saya memiliki kecakapan dan kesanggupan dalam menyampaikan gagasan kepada bawahannya secara lisan atau tidak langsung.
- GK4 Pimpinan instansi saya memiliki sikap tegas dan mampu mengendalikan bawahan dalam menjalankan tugas.
- GK5 Pimpinan instansi saya mampu mengendalikan emosi dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Evaluasi Outer Model

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model. Dalam PLS-SEM, dilakukan tahapan validitas konstruk untuk mengukur hubungan yang kuat antara konstruk dan item-item pertanyaan serta hubungan yang lemah dengan variabel lainnya (Hamid dan Anwar, 2019). Berdasarkan pengujian indikator kuesioner dengan menghitung *outer loading* bernilai $\geq 0,7$ maka indikator yang bernilai dibawah 0,7 dieliminasi dari pengujian selanjutnya. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian *outer loading* masing-masing indikator bernilai $\geq 0,7$ yang dinyatakan mutlak untuk proses pengujian selanjutnya.

Tabel 1. *Outer Loading Model*

	SPIP	GPG	AKP			SPIP	GPG	AKP	
SPIP.3	0,761			Valid	GPG.9		0,864		Valid
SPIP.5	0,728			Valid	GPG.10		0,848		Valid
SPIP.9	0,808			Valid	GPG.11		0,759		Valid
SPIP.10	0,885			Valid	GPG.12		0,783		Valid
SPIP.11	0,777			Valid	GPG.13		0,832		Valid
SPIP.18	0,722			Valid	AKP1			0,824	Valid
SPIP.21	0,791			Valid	AKP2			0,887	Valid
SPIP.22	0,735			Valid	AKP3			0,820	Valid

SPIP.25	0,763			Valid	AKP4			0,733	Valid
GPG.2		0,738		Valid	AKP5			0,835	Valid
GPG.3		0,785		Valid	AKP7			0,849	Valid
GPG.4		0,787		Valid	AKP8			0,716	Valid
GPG.6		0,872		Valid	AKP9			0,755	Valid
GPG.7		0,782		Valid	AKP10			0,798	Valid

Sumber: data diolah

Keterangan:

SPIP: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

GPG: *Good Public Governance*

GK: Gaya Kepemimpinan

AKP: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

4.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kualitas pertanyaan survei yang digunakan sebagai alat penelitian wajar. Item-item kuesioner dikatakan valid apabila mempunyai korelasi yang signifikan dengan total skor. Syarat terpenuhinya uji validitas melalui nilai *Average Variance Extracted (AVE)* bernilai $\geq 0,5$, maka semua variabel dinyatakan mutlak pengujian validitas. Tabel 2 menunjukkan bahwa SPIP, GPG, GK dan AKP memiliki nilai $\geq 0,5$, artinya semua variabel dapat dilakukan proses pengujian selanjutnya.

4.3 Uji Reliability

Uji realibitas digunakan untuk mengetahui keandalan suatu kuesioner dari variabel penelitian yang digunakan. Untuk menguji reliabilitas, dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Cronbach Alpha (a)* dengan nilai $\geq 0,7$ artinya kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan Tabel 2 variabel SPIP, GPG, GK dan AKP memiliki cronbach alpha (a) bernilai $\geq 0,7$, maka indikator kuesioner terbukti akurat, konsisten, tepat dalam mengukur konstruk dan dapat digunakan untuk proses pengujian berikutnya.

Tabel 2. Validitas dan Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
SPIP	0,917	0,922	0,931	0,602
GPG	0,940	0,944	0,949	0,650
GK	0,932	0,950	0,948	0,786
AKP	0,931	0,934	0,942	0,646

Sumber: data diolah

4.4 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gambaran karakteristik demografi responden dan gambaran setiap pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum, serta dapat diperoleh nilai variabel deskriptif dan frekuensi rata-rata. Tabel 3 menunjukkan statistika deskriptif untuk setiap indikator kuesioner.

Tabel 3. Statistika Deskriptif

	Rata-Rata	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
SPIP.3	0,000	0,148	-2,410	1,196	0,648
SPIP.5	0,000	0,251	-1,797	1,309	0,686
SPIP.9	0,000	-0,056	-1,799	1,115	0,589
SPIP.10	0,000	-0,151	-1,279	1,132	0,465
SPIP.11	0,000	0,000	-1,564	1,975	0,629
SPIP.18	0,000	0,081	-2,239	1,158	0,692
SPIP.21	0,000	-0,135	-2,008	2,317	0,612
SPIP.22	0,000	-0,132	-2,110	2,103	0,678
SPIP.25	0,000	0,137	-1,652	2,343	0,646
GPG.2	0,000	0,044	-1,258	1,436	0,674
GPG.3	0,000	0,065	-1,680	1,236	0,620
GPG.4	0,000	0,186	-1,736	1,531	0,617
GPG.6	0,000	-0,142	-1,375	1,290	0,489
GPG.7	0,000	-0,037	-1,504	1,996	0,623
GPG.9	0,000	0,110	-1,675	1,378	0,504
GPG.10	0,000	0,080	-1,597	1,125	0,530
GPG.11	0,000	0,144	-3,023	1,237	0,651
GPG.12	0,000	0,024	-1,925	2,186	0,622
GPG.13	0,000	-0,136	-1,305	1,257	0,555
GK.1	0,000	0,081	-1,022	2,197	0,524
GK.2	0,000	0,048	-1,294	1,163	0,368
GK.3	0,000	-0,091	-1,278	1,066	0,385
GK.4	0,000	0,048	-2,997	0,852	0,559
GK.5	0,000	-0,088	-1,226	0,811	0,446
AKP1	0,000	0,198	-2,321	1,452	0,566
AKP2	0,000	0,023	-0,940	1,638	0,462
AKP3	0,000	0,159	-1,694	1,301	0,572
AKP4	0,000	-0,155	-1,970	2,260	0,680
AKP5	0,000	0,199	-1,388	1,149	0,550
AKP7	0,000	-0,147	-2,051	1,168	0,528
AKP8	0,000	-0,010	-2,086	2,133	0,698
AKP9	0,000	-0,129	-2,302	2,228	0,655
AKP10	0,000	-0,062	-1,401	1,441	0,602

Sumber: Data Olahan, 2024

4.5 Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

	Sampel Asli (O)	P Values	Keterangan	
SPIP -> AKP	0,713	0,000	signifikan	diterima
GPG -> AKP	0,162	0,051	signifikan	diterima
GK * SPIP terhadap AKP -> AKP	0,170	0,098	signifikan	diterima
GK * GPG terhadap AKP -> AKP	-0,001	0,498	nonsignifikan moderasi	ditolak

Sumber: Data Olahan, 2024

4.5.1 Pengaruh SPIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SPIP memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam Tabel 4. Hal ini membuktikan bahwa H_1 diterima. Hasil penelitian ini berbeda dengan Azizah dan Hidayat (2023) yang menunjukkan hasil penelitian terhadap SPIP tidak berpengaruh positif kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Surabaya. Namun penelitian ini selaras dengan penelitian Tome et al., (2023) bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Provinsi Papua.

Pelaksanaan SPIP di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga akuntabilitas kinerja instansi dianggap baik dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program sesuai dengan sumber daya yang ada. Pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan bahwa semua aktivitas kementerian sesuai dengan peraturan dan berjalan efektif dan efisien. Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap tahun telah menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada website yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

4.5.2 Pengaruh GPG terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Penerapan GPG dalam Tabel 4 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah atau H_2 diterima. Penelitian ini memverifikasi hasil pengujian Heluka et al., (2022) bahwa *good governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Yahokimo. Penelitian Israr dan Syofyan (2022) juga selaras dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan pengaruh positif antara penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja pada organisasi perangkat daerah di Kota Padang. Sementara itu, pengujian Rahmani (2023) menghasilkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja dinas Kota Bandung.

Pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan jelas, tepat dan transparan. *Good public governance* di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memastikan bahwa instansi beroperasi untuk mencapai tujuan pembangunan. Tercapainya tujuan organisasi sesuai penerapan *good public governance* membuktikan bahwa akuntabilitas kinerja telah dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu dan transparan di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4.5.3 Peran Moderasi Gaya Kepemimpinan dalam Hubungan SPIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan uji hipotesis Tabel 4 menunjukkan bahwa H_3 ditolak karena gaya kepemimpinan memperlemah pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Gaya kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dinilai kurang mempengaruhi SPIP untuk mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja yang baik. Hal tersebut didukung dengan adanya temuan BPK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 terkait kelemahan SPIP dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penatausahaan kerjasama BTS 4G BAKTI yang tidak optimal, pembayaran Operasional dan Pemeliharaan (OM) pada BTS 4G BAKTI yang tidak sesuai ketentuan dasar perhitungan, belanja modal penyediaan perangkat Hub dalam

mendukung proyek SATRIA-1 Tahun 2023 memiliki potensi pemborosan dan penyajian Belanja Dibayar Di Muka (BDDM), Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Konstruksi Dalam Pengerjaan BTS 4G BAKTI belum dapat diyakini kewajarannya (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024). Penelitian ini mendukung hasil pengujian dari Pitaloka, Carolina, dan Abrori (2022).

4.5.4 Peran Moderasi Gaya Kepemimpinan dalam Hubungan GPG terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa H_4 ditolak, artinya gaya kepemimpinan tidak memperlemah hubungan positif penerapan GPG terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepemimpinan tidak mempengaruhi tata kelola pemerintah karena sudah adanya prosedur yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai, serta peraturan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Kejelasan atas peraturan yang ada menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam bertindak untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga gaya kepemimpinan seorang pemimpin tidak berpengaruh dalam tata kelola organisasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini sesuai dengan hasil temuan yang diperoleh Erliyanti, Yuniani, dan Hamdani (2022) bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap GPG. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas (Pitaloka, Carolina, dan Abrori, 2022).

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan atas pengaruh SPIP dan penerapan GPG terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa SPIP dan penerapan GPG berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Untuk peran gaya kepemimpinan memperlemah pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sementara itu peran gaya kepemimpinan pada penerapan GPG tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan topik yang telah dibahas, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun Pedoman Inspektur Jenderal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pedoman-pedoman tersebut harus menjadi perhatian, diimplementasikan secara jelas, dan perlu dilakukan monitoring serta evaluasi oleh satuan kerja internal kementerian untuk memenuhi pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Penulis juga berharap kepada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa Kementerian/Lembaga untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, dapat menggunakan metode yang berbeda seperti wawancara langsung dengan responden. Perlunya pemahaman lebih dalam terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Limitasi

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu item kuesioner disusun berdasarkan sumber-sumber yang terbatas, sehingga menyebabkan beberapa item kuesioner dinyatakan tidak valid. Penyebaran kuesioner melalui google form belum diyakini keabsahan atas jawaban yang diberikan oleh responden dan tidak dapat dikonfirmasi secara langsung.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan bermanfaat untuk seluruh pihak.

Referensi

- Amalia, R., Kharisma, A. N., & Firmansyah, A. (2024). Pengungkapan Aspek Sosial Sesuai Standar GRI 400 Versus Kepercayaan Pemangku Kepentingan. *Akuntansiku*, 3(3), 145–156. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i3.672>
- Anggriany, E., & Hasnawati. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Intern, Dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1239–1246. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16026>
- Aziz, A., & Fitriaty. (2023). Pengaruh perencanaan anggaran, tata kelola dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja kpu provinsi jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(03), 635–647. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v12i03.22699>
- Badan Kepegawaian Negara. (2021). *Pedoman Cascading Target Kinerja*. 1–283. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Buku-Pedoman-Cascading-Target-Kinerja.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023*. 9.
- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *The Academy of Management Journal*, 45(1), 43. <https://doi.org/10.2307/3069284>
- Doni, R. A., Sukraini, J., Defitri, S. Y., Yeni, A., Sriyanti, E., & Nurhayati. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Organisasi*, 7(2), 327–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/jumbo.v7i2.529>
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5252–5265. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1825>
- Febrianti, T., & Indrawati Yuhertiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). Struktural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Hardana, A. (2023). Analisis Kepemimpinan Transformasional terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263–272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2726>
- Harjaningrum, E. A., & Ardini, L. (2021). Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3739>
- Haryanto. (2023). Pelatihan Blended Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Dasar Bagi Kementerian/Lembaga yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan-Kemenkeu bekerjasama dengan Kemkominfo Jakarta-Pusdiklat Kominfo, 3-4 Juli 2023. In *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Haryanto, P., & Andayan, R. T. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Seminar Nasional Perbanas Institute*, 3(December 2023), 70–84. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/issue/view/55>
- Heluka, R., Pattiasina, V., Sutisman, E., Bonsapia, M., & Patiran, A. (2022). Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Business Application*, 1(1), 39–52.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.51135/jba.v1.i1.p39-52>
- Ibrahim, I. A. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan , Budaya Organisasi , Kompetensi Pegawai Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Yang. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah*, 1(1), 13–20. <https://ejurnal.itbkpp.ac.id/index.php/JEP3D/article/view/11>
- Ismail, A. H. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah melalui Pengendalian Internal pada OPD Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 356–370. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4036>
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 4(4), 686–697. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550>
- Jeaneta, M. E. S., & Handayani, N. (2024). Pengaruh Kepuasan Kerja, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5754>
- Julythiawati, N. P. M., & Ardiana, P. A. (2023). Pengaruh Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Tanggung Jawab Sosial Pada Reputasi Perusahaan. *Public Service and Governance Journal*, 4(2), 239–246. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.1016>
- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 300–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.427>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi Kinerja – Logic Model*. Kementerian Keuangan.
- Kisworo, J., & Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 305–321. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.157>
- Krisnanda, K. P., & Anwar, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2718–2735. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15759>
- Makruf, M. R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial di Kota Mojokerto. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2775>
- Manik, Nainggolan, & Nainggolan. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Manajemen*, 8(2), 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.46880/siakun.V1N1.H1-10>
- Marsus, S. (2022). Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka)*, 2(1), 65–79. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i1.1755>
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Mujannah, M., Safriansyah, S., Firdaus, I., & Fatimah, S. (2022). Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. *Owner*, 6(3), 3065–3076. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006>
- Noormansyah, I., & Sirkomba, H. A. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi ASN dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 618–627. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v11i02.958>
- Padmadiani, R., Blongkod, H., & Wuryandini, A. R. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 240–251. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5906>
- Palupi, A., Prudencia, Q. A., Syafei, A. W., & Jumansyah, J. (2024). Analisis Akuntabilitas Kinerja

- Sekolah dari Perspektif Teori Pemangku Kepentingan. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), 359–375. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1519>
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Republik Indonesia*, 2504, 1–9.
- Pitaloka, B. D. G., Carolina, A., & Abrori, R. (2022). Peran Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas. *InFestasi*, 18(2), Inpress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.17534>
- Pitaloka, J. J., & Handayani, N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada OPD Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 1–20.
- PP No 60 Tahun 2008. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- PUGSPI. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1–80.
- Putra, G. H., & Fitri, V. A. (2024). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4255–4268. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.6757>
- Putra, G. H., Rivandi, M., & Zulvia, D. (2024). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jrea: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 281–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1899>
- Rahmani, T. N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Journal of Economics, Finance, and Social Science Review*, 1(1), 23–37.
- Rakhma, S. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Determinan Penganggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/issue/view/169>
- Sidik, J., & Safitri, D. (2020). Motivasi kerja Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Ambiguitas Peran terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(3), 195–212. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i3.35>
- Sinulingga, D. A. (2022). *Efektivitas Penyusunan LAKIP dalam Meningkatkan Tertib Administrasi di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara*. [http://eprints.ipdn.ac.id/8996/1/Demi Alo Sinulingga- 29.1009- efektivitas penyusunan lakip dalam meningkatkan tertib administrasi di kabupaten karo provinsi sumatera utara.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/8996/1/Demi%20Alo%20Sinulingga-29.1009-efektivitas%20penyusunan%20lakip%20dalam%20meningkatkan%20tertib%20administrasi%20di%20kabupaten%20karo%20provinsi%20sumatera%20utara.pdf)
- Siti Nur Azizah, & Muhammad Taufiq Hidayat. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. *Journal of Student Research*, 1(2), 155–175. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.976>
- Steni, M. F., & Fitria, A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Anggaran Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585, 1–17. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/issue/view/196>
- Sugiarto, S. (2024). Sistem Pengendalian Internal dalam Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 3(2), 106–112. <https://www.icbrj.org/index.php/icbrj/issue/view/14>
- Sutarsa, M. (2023). Pengaruh Good Governance Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Dinas Pemerintah (Sensus pada Dinas Kota Tasikmalaya). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(1), 201–210. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i1.1196>
- Tome, S., Yamin Noch, M., Pasolo, F., & Sonjaya, Y. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Sriyanti. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 217–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.6213>

- Wahida, P. F., & Suryaningrum, D. H. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Intensitas Inovasi dan Kinerja Organisasi Sektor Publik di Surabaya dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2357–2371. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6620>
- Wahyu, P. A. S., Wianto Putra, I. M., & Giri, N. P. R. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Pemahaman Good Governance, Profesionalisme, dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor BPK RI Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 45–50. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4715.45-50>
- Zaviera, P., Yuliansyah, Y., & Nauli, P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi pada Rumah Sakit Swasta Kota Bandar Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.236>